KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	**NOMOR SOP**	: W.7-OT.01.02-2375
	TGL. PEMBUATAN	: 24 Maret 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto NIP. 196504081987031002
	NAMA SOP	: **PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 2. Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum; 3. Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU.UM.01.01-6 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi.	1. Memahami pedoman tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi; 2. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi; 3. Mengetahui membuat format Surat Keterangan Terdafar
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU.UM.01.01-6 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi 2. Komputer/Printer/Scanner; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan adanya ketidakpastian hukum akan Pendirian Badan Hukum Partai Politik di tingkat Nasional	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHART SOP PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Penerima	Pejabat Pengawas	Perlengkapan /Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan SKT Partai Politik tingkat Provinsi					1 menit		
2	Memberikan informasi syarat dokumen tata Cara Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi					10 menit		
3	Melengkapi Dokumen Persyaratan					2 hari		
4	Verifikasi Dokumen dan Pemeriksaan					1 hari		
5	Menerima Pemberitahuan Penerbitan SKT					1 hari		
6	Pemohon menerima SKT Partai Politik tingkat Provinsi					2 hari		

